

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TA 2019

Banda Aceh, Rabu (16 Juni 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya TA 2019 pada Pukul 10.00 WIB dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Pukul 15.00 WIB.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA.** dan diterima langsung oleh **Muslem D** selaku Ketua DPRK Aceh Jaya dan **Tgk. Yusri S** selaku Wakil Bupati Aceh Jaya. Sedangkan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan diterima langsung oleh **Kadir Jailani** selaku Ketua DPRK Pidie Jaya dan **Aiyub Bin Abbas** selaku Bupati Pidie Jaya.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie Jaya TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Untuk Kabupaten Aceh Jaya, pokok permasalahan tersebut yaitu (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah BOK Puskesmas pada Dinas Kesehatan belum didukung bukti pertanggungjawaban kegiatan yang memadai; (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya belum sepenuhnya memadai; (3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Rangkap pada Kegiatan BOK Puskesmas; dan (4) Kekurangan Volume pada Tujuh Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan untuk Kabupaten Pidie Jaya, beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya memadai; (2) Kesalahan penganggaran belanja pada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD); (3) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum sepenuhnya memadai; (4) Pengelolaan pendapatan lima OPD masih belum optimal; (5) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Krueng Meureudu belum dicatat dalam Laporan Keuangan; (6) Kekurangan volume pekerjaan atas empat paket pekerjaan pada dua OPD; dan (6) Terdapat penggunaan langsung atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan